BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Akuntansi

Sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas Sistem diperlukan dalam suatu unit usaha agar tujuan dapat dicapai dengan melakukan kegiatan bersama-sama oleh bergbagai unsur. Menurut Jogiyanto (2009:34) Sistem dapat di definisikan dengan pendekatan prosedur dan dengan pendekatan komponen. Sedangkan, sistem menurut Mc. Leod (2008: 9) dalam bukunya yang berjudul *"Management Information System"* menyatakan bahwa pengertian sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai tujuan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem merupakan sekumpulan unsur atau elemen, cara tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan.

Ada beberapa pengertian akuntansi yang diungkapkan penulis dalam penelitian untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang akuntansi sebelum lebih jauh membahas mengenai akuntansi pemerintah diantaranya adalah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhitsaran transaksi, dan kejadian keuangan, penginterprestasian atas hasilnya, serta penyajian laporan. Akuntansi juga merupakan media komunikasi dalam dunia usaha, dimana penerapan akuntnasi yang berlaku di setiap perusahaan/instansi itu berbeda. Hal ini tergantung pada jenis atau badan usaha, besar atau kecilnya perusahaan/instansi, rumit atau tidaknya masalah keaungan perusahaan/instansi tersbeut. Akuntansi dikatakan berjalan dengan baik jika ditunjang dengan suatu sistem yang memadai serta sesuai dengan kebutuhan.

Menurut *Comite of Terminology of the Accounting Institue of Certified Public Accountans* (AICPA) dalam Harahap (2008: 5) adalah akuntansi sebagai suatu pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian yang umumnya bersifat keuangan termsauk menafsirkan hasil-hasilnya. Dari definisi-definisi diatas menunjukkan bahwa pengertian akuntansi wajib menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan yang bersifat ekonomi. Menurut Mulyadi (2013: 3) sistem akuntansi adalah organisasi, formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengelolaan. Sedangkan Susanto (2011: 124) mengemukakan bahwa sistem akuntansi adalah:

> "Didefinisikan sebagai kumpulan dari sub sistem – sub sistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan oleh pengambil keputusan dalam proses pengambil keputusan di bidang keuangan"

Menurut Baridwan (2008: 4) berpendapat bahwa sistem akuntansi adalah:

> "Formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengelolah data mengenai usulan suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan baik dalam bentuk laporan-laporan yang dilakukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham kreditur dan lembaga-lembaga pemerintahan untuk memulai hasil operasi".

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi adalah suatu organisasi yang digunakan untuk merangkum semua kegiatan dan transaksi suatu organisasi baik di bidang sekor publik ataupun komersial, Yang berguna untuk menghasilkan informasi yang diperlukan oleh manajemen sebagai alat pengawasan demi kelancaran aktivitas suatu organisasi dimasa yang akan datang.

2.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

2.2.1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Definisi menurut Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah. Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah itu sendiri terdapat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang berbunyi: ”Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) adalah suatu sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atas kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi” (Pasal 70 ayat 1).

Menurut Mahsun, dkk (2006: 185) sistem akuntansi keuangan daerah merupakan aktivitas jasa untuk meyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan pada sektor publik, pengambilan keputusan terkait dengan keputusan baik pada sektor ekonomi, sosial, dan politik. Sementara menurut Halim (2007:43) “Sistem akuntansi keuangan daerah adalah suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (provinsi, kabupaten, kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan”.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 pasal 241 mengatakan bahwa:

> “Serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual ataupun menggunakan aplikasi komputer.”

Berdasarkan pendapat beberapa ahli dan peraturan di atas maka dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan sistem akuntansi keuangan daerah adalah suatu

prosedur yang dimulai dari pengumpulan data sampai dengan pelaporan keuangan dengan menggunakan sistem dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2.2.2 Tujuan Sistem Akuntansi keuangan Daerah

Darise (2008: 28) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pemerintah adalah sebagai:

1. Pertanggungjawaban
   Memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan.
2. Manajerial
   Akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah.
3. Pengawasan
   Akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Sedangkan Halim (2007: 35) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis pada umumnya adalah sama yaitu sebagai:

1. Pertanggungjawaban (*Accountability and Stewardship*)
   Tujuan pertanggungjawaban adalah memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat dan berguna bagi pihak yang bertanggungjawab terhadap operasi unit-unit pemerintah. Lebih lanjut tujuan pertanggungjawaban ini mewajibkan setiap orang atau badan yang menglola keuangan negara meberikan pertanggungjawaban perhitungan.
2. Manajerial
   Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaka, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah.
3. Pengawasan
   Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah ahruas memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

2.2.3 Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah

Erlina dan Rasdianto (2013: 2) mengatakan secara umum akuntansi dibedakan atas akuntansi sektor privat dan akuntansi sektor publik. Menurut Erlina Rasdianto (2013: 2) mengemukakan bahwa akuntansi terdiri dari 2 bidang utama yaitu:

1. Akuntansi Komersial Perusahaan
   Dalam akuntansi komersil, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi keuangan kepada manajemen, pemilik modal, penanaman modal, kreditor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan penetapan pajak. Akuntansi komersial perusahaan adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada entitas bisnis (perusahaan) yang mencari keuntungan atau laba.
2. Akuntansi Sektor Publik
   Akuntansi sektor publik adalah yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi non profit atau nirlaba. Laporan yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan sektor publik atau lebih dikenal dengan standar akuntansi pemerintahan. Akuntansi sektor publik dibagi atas : Akuntansi Pemerintah Akuntansi digunakan untuk memberi informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Akuntansi pemerintah dibedakan atas akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah daerah terdiri dari akuntansi pemerintahan provinsi danakuntansi pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah perlu mengatur standar akuntansi pemerintahan daerah agar dapat digunakan secara seragam diseluruh pemerintah daerah. Akuntansi Sosial Akuntansi sosial merupakan bidang akuntansi khusus untuk diterapkanpada lembaga dalam artian makro yang melayani perekonomian nasional. Akuntansi sosial adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi non profit atau nirlaba. Akuntansi ini banyak dipakai oleh organisasi sektor publik, seperti partai politik, masjid, puskesmas, rumah sakit, sekolah atau universitas, dan lembaga swadaya masyarakat.

Berdasarkan klasifikasi di atas, kedudukan akuntansi keuangan daerah dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini:

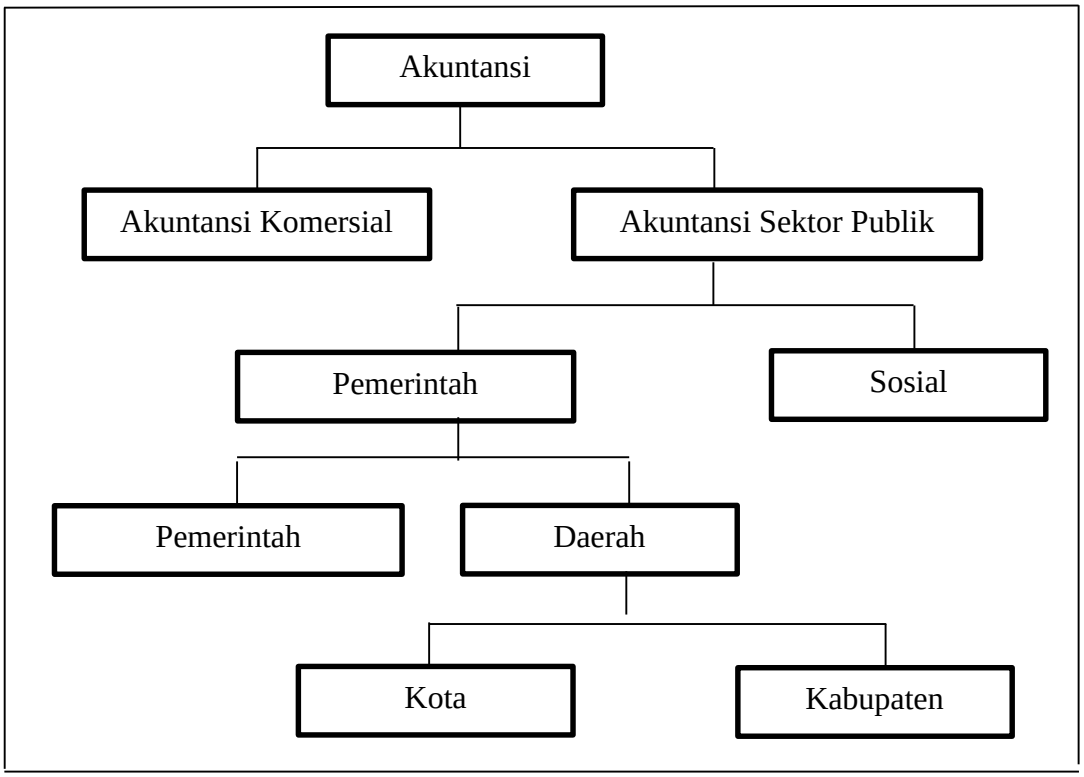

Sumber: Erlina dan Rasdianto (2013)

Gambar 2.1
Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah

2.3 Proses Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut secara periodik melalui laporan keuangan yang meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran SKPD
2. Neraca SKPD
3. Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca; dan
3. Catatan atas Laporan Keuangan.

Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), dan Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dilakukan oleh PPK-SKPD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang pengelolaan Keuangan Daerah bahwa sistem akuntansi pemerintahan daerah harus meliputi minimal sebagai berikut:

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas;
2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas;
3. Prosedur Akuntansi Aset Tetap; dan
4. Prosedur Akuntansi Selain Kas.

2.3.1 Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 241 mengatakan bahwa prosedur akuntansi penerimaan kas adalah:

> "Serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keaungan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer".

Prosedur akuntansi penerimaan kas dilaksanakan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan (PPK-SKPD). PPK-SKPD melakukan pencatatan ke dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan buktki transaksi ke dalam jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening dan secara periodik jurnal diposting ke dalam buku besar. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas adalah:

1. Surat tanda bukti pembayaran
2. Surat Tanda Setoran (STS)
3. Bukti transfer; dan
4. Nota kredit Bank

2.3.2 Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 247 mengatakan bahwa prosedur akuntansi penerimaan kas adalah:

> "Serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakuakan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer"

Prosedur akuntansi penerimaan kas dilaksanakan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan (PPK-SKPD). PPK-SKPD melakukan pencatatan ke dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan buktki transaksi ke dalam jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening dan secara periodik jurnal diposting ke dalam buku besar. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas mencakup sebagai berikut:

1. SP2D
2. Nota debet Bank; dan
3. Bukti pengeluaran kas lainnya.

2.3.3 Prosedur Akuntansi Aset

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 253 mengatakan bahwa prosedur akuntansi penerimaan kas adalah Serangkaian pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai atau digunakan oleh SKPD. Prosedur akuntansi penerimaan kas dilaksanakan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan (PPK-SKPD) Serta pejabat penanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah. PPK-SKPD melakukan pencatatan ke dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan buktki transaksi ke dalam jurnal umum dan secara periodik jurnal tersebut diposting kedalam buku besar. Setiap aset tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan penyusutan yang sistematis sesuai dengan masa manfaatnya.

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset berupa bukti memorial yang memuat informasi sebagai berikut:

1. Jenis/ nama aset tetap;
2. Kode rekening;
3. Klasifikasi aset tetap;
4. Nilai aset tetap; dan
5. Tanggal transaksi dan/ atau kejadian.

2.3.4 Prosedur Akuntansi Selain Kas

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 259 mengarakan bahwa prosedur akuntansi penerimaan kas adalah:

> "Serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer".

Prosedur akuntansi selain kas dilaksanakan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan (PPK-SKPD). PPK-SKPD melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum berdasarkan bukti transaksi ke dalam jurnal umum, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke dalam buku besar. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas berupa bukti memorial yang memuat informasi sebagai berikut:

1. Berita acara penerimaan barang;
2. Surat keputusan penghapus barang;
3. Surat keputusan mutasi barang;
4. Berita acara pemusnah barang;
5. Berita acara serah terima barang;
6. Berita acara penilaian; dan
7. Berita acara penyelesaian pekerjaan.

2.4 Prosedur Pencatatan

Prosedur pencatatan pada akuntansi pemerintah dibagi kedalam enam bagian yaitu pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana (Afiah 2009: 48).

1. Prosedur Pencatatan Akuntansi Pendapatan
   Transaksi pendapatan di Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dicatat oleh fungsi akuntansi PPKD. Transaksi ini dicatat harian pada saat kas diterima oleh Kas Daerah atau pada saat menerima bukti transfer dari pihak ketiga. Akuntansi Pendapatan ini juga dilaksanakan berdasarkan asa bruto.
2. Prosedur Pencatatan Akuntansi Belanja
   Transaksi belanja di Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dicatat oleh fungsi akuntansi PPKD. Transaksi dicatat saat pengesahan SPJ bila menggunakan SP2d UP/GU/TU atau pada saat menerima SP2D LS bila menggunakan LS. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan asa bruto. Untuk transaksi belanja modal pencatatan dilakukan dengan dua jurnal.
3. Prosedur Pencatatan
   Transaksi penerimaan pembiayaan dicatat dengan menggunakan asas bruto, dan diakui pada saat diterima pada rekening kas daerah. Sedangkan transaksi pengeluaran pembiayaan diakui pada dikeluarkan dari rekening kas daerah.
4. Prosedur Pencatatan Akuntansi Aset
   Prosedur pencatatan aset pada akuntansi Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) lebih merupakan pencatatan atas pengakuan aset yang muncul dari transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh pemda. Berdasarkan bukti yang ada dan fungsi akuntansi PPKD membuat bukti memorial yang memuat informasi tentang jenis / nama aset, kode rekening terkait, nilai aset, dan tanggal transaksi. Bukti memorial tersebut akan dipakai sebagai dasar pencatatan jurnal oleh fungsi akuntansi PPKD.
5. Prosedur pencatatan Akuntansi Kewajiban
   Prosedur pencatatan kewajiban pada akuntansi Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah lebih lebih merupakan pencatatan atas pengakuan kewajiban yang muncul dari transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh pemda, pengakuan atas bagian lancar utang jangka panjang dan pencadangan atas utang jangka pendek. Berdasarkan bukti yang ada fungsi akuntansi PPKD membuat bukti memorial yang memuat informasi tentang sejenis / nama kewajiban, kode rekening terkait, nilai kewajiban, dan tanggal transaksi. Bukti memorila tersbeut akan dipakai sebagai dasar pencatatan oleh jurnal, oleh fungsi PPKD.
6. Prosedur Pencatatan Akuntansi Ekuitas Dana
   Prosedur pencatatan ekuitas dana pada akuntansi Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) merupakan pencatatan atas pengakuan

ekutias dana yang muncul dari transaksi investasi jangka panjang, kewajiban jangka panjang beserta reklasifikasinya dan dana cadangan yang dilakukan oleh pemda.

2.5 Sistem Pencatatan

Menurut Halim (2007: 45) terdapat beberapa sistem pencatatan yaitu *single entry, double entry, triple entry.* Pembukuan hanya menggunakan sistem pencatatan *single entry* sedangkan akuntnasi dapat menggunakan ketiga sistem pencatatan tersebut.

1. *Single entry*
   Sistem pencatatan *single entrys* sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal. Dalam sistem ini pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali saja. Sistem pencatatan *single entry* atau tata buku ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu sederhana dan mudah dipahami. Tetapi sistem ini juga memiliki kelemahan antara lain kurang bagus untuk pelaporan dan sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi.
2. *Double entry*
   Sistem pencatatan *double entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku berpasangan, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan isitilah *menjurnal.* Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Dengan menggunakan *double entry* maka setiap transaksi yang terjadi akan tercatat pada akun yang tepat, karena masing-masing akun berfungsi sebagai media pengecekan. Selain ketepatan dalam pencatatn akun, *doubke entry* juga memiliki kemampuan untuk mencatat transaksi dalam jumlah nominal akurat, karena jumlah sisi debet harus sama dengan jumlah sisi kredit.
3. *Triple entry*
   Sistem pencatatan *triple entry* adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry* ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Oleh karena itu, sementara sistem pencatatan *double entry* dijalankan, sub bagian pembukuan (bagian keuangan) pemerintah daerah juga mencatat transaski tersebut pada buku anggaran sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran.

2.6 Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan serta realisasi anggaran,arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (Nordiawan 2007: 294). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 mengungkapkan:

> Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
> 1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
> 2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
> 3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
> 4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
> 5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
> 6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
> 7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
>
> Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal :
> 1. Aset;
> 2. Kewajiban;
> 3. Ekuitas;
> 4. Pendapatan;
> 5. Belanja;
> 6. Transfer;
> 7. Pembiyaan;
> 8. Saldo anggaran lebih;
> 9. Pendapatan-LO;
> 10. Beban; dan
> 11. Arus kas

Suatu organisasi pemerintah dapat dikatakan baik dan sesuai tujuan jika tujuan dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat tercapai. Tujuan

yang ingin dicapai adalah pemerintah mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah yang berkualitas. Dalam rangka melanjutkan reformasi dibidang pengelolaan keuangan daerah pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. PP ini selanjutnya terus diperbaharui dengan dikeluarkannya PP No.58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Kementerian Dalam Negeri juga telah menerbitkan Peraturan No.13 Tahun 2006 yang memuat pedoman pengelolaan keuangan daerah. Disamping itu penerapan SAKD juga ditempatkan dalam upaya mencapai komputerisasi dalam organisasi pemerintah. Penerapan SAKD diharapkan akan menghasilkan catatan dan laporan atas transaksi keuangan yang terjadi dalam entitas pemerintah daerah menjadi lebih akurat, tepat, dan komprehensif sehingga dapat memperbaiki kualitas keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan tersebut.

2.7 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.7.1 Definisi dan Konsep Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan laporan yang menyajikan mengenai struktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan yaitu menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Bastian (2010: 9) Laporan Keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Menurut Erlina dan Rasdianto (2013: 21) mengemukakan bahwa:

> “Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya.” Sedangkan Menurut Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010, Tujuan laporan keuangan terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus:

1. Tujuan umum dari laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
2. Tujuan khusus laporan keuangan adalah pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajiakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa laporan keuangan adalah proses akuntansi yang terstruktur dalam suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak.

2.7.2 Tujuan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa :

> Laporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan cara:
> 1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
> 2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk mebiayai seluruh pengeluaran.
> 3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
> 4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
> 5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
> 6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan / ekonomi, *transfer*, pembiayaan, sisa lebih / kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan dana arus kas suatu entitas pelaporan.

2.7.3 Jenis dan Bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntanbilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahahan terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
   Unsur yang dicakup dalam laporan realisasi anngaran mencakup Pendapatan, Belanja, *Transfer*, dan Pembiayaan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
   Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penururnan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan tersebut terdiri dari Saldo Anggaran Lebih, dikurangi Penggunaan saldo Anggaran Elbih sebagai penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan dijumlahkan dengan Sisa Lebih atau Kurang pembiayaan Angaaran, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.
3. Neraca
   Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.
4. Laporan Operasional
   Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan pengunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan Operasional terdirid dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer.
5. Laporan Arus Kas
   Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan Akuntansi Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Transitoris yang mengaambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup oleh laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas daerah dari empat aktivitas:
   1). Aktivitas Operasi
   2). Aktivitas Investasi
   3). Aktivitas Pendanaan
   4). Aktivitas Transitoris.
6. Laporan Perubahan Ekuitas
   Laporan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.
7. Catatan atas Laporan Keuangan
   Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan dan memuat hal-hal sebagai berikut:

1). Menyajikan informasi tetang ekonomi makro, Kebijakan fiskal/keuangan dan pencapaian target perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
2). Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama satu tahun pelaporan.
3). Meyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transkaksi-transaksi dan keajdian-kejadian penting lainnya.

2.7.4 Karakteristik kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengemukakan bahwa Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu (PP No. 71/2010).

1. Relevan.
   Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi-informasi yang relevan yaitu mencakup:
   1). Memiliki manfaat umpan balik *(feedback value).*
   Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
   2). Memiliki manfaat prediktif *(predictive value).*
   Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
   3). Tepat waktu.
   Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
   4). Lengkap.
   Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal.
   Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik, yaitu:
   1). Penyajian jujur.
   Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
   2). Dapat diverifikasi *(verifiability).*
   Informasi disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
   3). Netralitas.
   Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tetentu.
3. Dapat dibandingkan.
   Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas laporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
4. Dapat dipahami.
   Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.8 Review Penelitian Terdahulu

Judul yang diangkat tentu tidak lepas dari penelitian terdahulu sebagai landasan dan referensi dalam menyusun sebuah kerangka pikir ataupun arah dari penelitian ini. Penelitian ini di buat dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Botutihe (2013)	Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota gorontalo	X:penerapan sistem akuntansi keuangan daerah Y: kualitas laporan keuangan pemerintah kota gorontalo	Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan dengan Koefisien determinasi sebesar 80.6%.
2	Harefa (2014)	Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung)	X1: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah X2: Standar Akuntansi Pemerintah Y: Kualitas Laporan Keuangan	Penelitian menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh posisitif terhadap kualitas Laporan Keuangan
3	Permadi, A. D. (2013).	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat).	X:Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Y: Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Berdasarkan hasil pegujian hipotesis menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
4	Patra , Bustami, Hasriani (2015)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah	X:Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Y: Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Berdasarkan pengujian sistem akuntansi keaungan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5	Ihsanti (2014)	Pengaruh Kompetensi SDM dan Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi *empiris* pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota)	X1: Kompetensi SDM X2: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Y: Kualitas Laporan Keuangan	Hasil menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan SAKD tidak berepngaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Sumber : Data yang diolah 2017

2.9 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan pelaksanaan dalam menerapkan seluruh komponen dalam sistem akuntansi keuangan daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 sistem akuntansi keuangan daerah adalah Serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual ataupun menggunakan aplikasi komputer. Jika belum memahami sistem akuntansi, maka belum memahami penyusunan laporan keuangan, karena

akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi atau laporan keuangan (Bastian, 2007:4). Sistem akuntansi pemerintah daerah yang disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, sebab apabila ada masalah pada salah satu bagian saja dari siklus akuntansi tersebut bisa berakibat laporan keuangan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas (Mahmudi, 2010:27). Berdasarkan teori-teori tersebut, dapat dikatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Oleh karena itu dengan adanya Sistem Akuntansi keuangan Daerah yang baik maka akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Botutihe (2013) menunjukan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Gorontalo. Dan dalam Penelitian Permadi (2013) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.

2.10 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori-teori yang sudah dijelaskan, dalam membuat dan melaporkan informasi keuangan daerahnya yang mengacu pada suatu sistem pemerintahan Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur pedoman penyusunan akuntansi untuk membuat laporan keaungan pemerintah daerah agar dapat menghasilkan laporan keaungan yang berkualitas. penulis menuangkan kerangka pemikiran dari penelitian ini dalam bentuk kerangka pemikiran sebagai berikut:

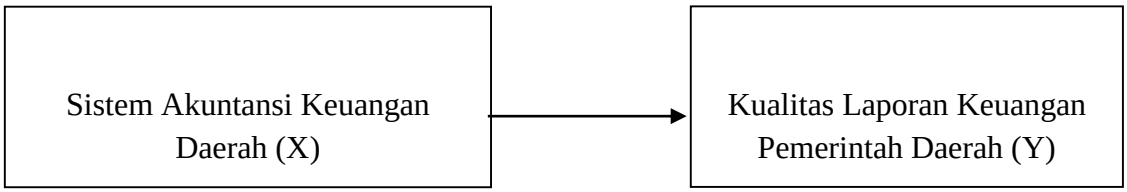

Sumber: Data yang diolah, 2017

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran

2.11 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan Rumusan penelitian yang dijelaskan sebelumnya, maka hipotesis sementara yang diajaukan dalam penelitian ini adalah:

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 pasal 241 SAKD merupakan Serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual ataupun menggunakan aplikasi komputer. Tujuan Sistem akuntansi keuangan adalah: (1) Pertanggungjawaban, (2) Manajrerial, (3) Pengawasan Halim (2007: 35). Sistem akuntansi keuangan daerah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam menyusun dan meyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi pemerintah daerah yang disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, sebab apabila ada masalah pada salah satu bagian saja dari siklus akuntansi tersebut bisa berakibat laporan keuangan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh botutihe (2013) menunjukkan bahwa SAKD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka hubungan antara sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

Ha: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan daerah